

Pj. Bupati Bombana Paparkan Evaluasi Kinerja Triwulan III di Kemendagri

Jakarta, sultranet.com - Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, bersama dengan Sekretaris Daerah serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melakukan pemaparan laporan evaluasi kinerja Triwulan III di kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat. Laporan yang mencakup periode 27 Mei 2024 hingga 27 Agustus 2024 tersebut menyoroti pencapaian dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bombana selama tiga bulan terakhir. Selasa (27/8/2024)

Dalam presentasinya, Edy Suharmanto menguraikan berbagai program pembangunan yang telah dijalankan, termasuk peningkatan infrastruktur dasar, kualitas kesehatan, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bombana. Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah program yang sedang berjalan serta strategi yang diterapkan untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul selama triwulan ini.

“Kami telah berusaha maksimal dalam menjalankan berbagai program pembangunan di Bombana. Namun, tentu masih ada tantangan yang harus dihadapi, dan kami berharap masukan dari Kementerian Dalam Negeri dapat menjadi panduan untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja kami di masa mendatang,” ujar Edy Suharmanto.

Pemaparan ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah. Edy Suharmanto berharap bahwa laporan ini tidak hanya menjadi bahan evaluasi internal tetapi juga memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik dan memastikan setiap program memberikan dampak positif bagi masyarakat Bombana. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mewujudkan hal ini,” tambahnya.

Pemaparan laporan evaluasi kinerja Triwulan III ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah Bombana untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pemerintah daerah berharap laporan ini dapat menjadi landasan untuk perbaikan yang lebih baik di masa depan, sekaligus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Sumber: Kominfo

Distan Bombana Sosialisasikan Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian

Bombana, sultranet.com - Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan sosialisasi penerapan standarisasi instrumen pertanian tanaman pangan di Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Selasa (27/8/2024).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman petani tentang pentingnya penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam proses pertanian, guna meningkatkan kualitas benih dan hasil pertanian di wilayah tersebut.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Hasriani Husein, SP., yang membuka acara mewakili Kepala Dinas Pertanian. Turut hadir Kepala BPSIP Sultra, Dr. Abdul Wahab, SP, MP., perwakilan Badan Standardisasi Nasional (BSN) Sulawesi Selatan, Ahmad Hawari Assufi, S.Si., serta beberapa pejabat dan tokoh pertanian lainnya.

Dalam sambutannya, Dr. Abdul Wahab menjelaskan tugas dan fungsi BSIP, serta menekankan pentingnya penerapan standar pertanian yang tercantum dalam SNI No. 8969:2021 dan SNI No. 6233:2015.

“Standar ini berperan besar dalam memastikan mutu produk tanaman pangan yang dihasilkan petani, serta meningkatkan daya saing mereka di pasar nasional maupun internasional,” ujarnya.

Sementara itu, Hasriani Husein, SP., dalam sambutannya, menyoroti pentingnya penggunaan benih berkualitas tinggi untuk meningkatkan hasil pertanian. Ia juga menggarisbawahi pentingnya penangkaran benih di Desa Tampabulu dan Desa Toburi, agar benih hasil pertanian tidak hanya dijual ke penggilingan, tetapi juga dapat dijadikan sumber benih lokal yang bermanfaat bagi petani setempat.

“Saya juga berharap para petani dapat menerapkan budidaya padi yang baik sesuai standar, sehingga produktivitas pertanian dapat terus meningkat dan pendapatan petani turut bertambah,” jelasnya.

Acara ini juga diisi dengan pemaparan dari BSN mengenai Cara Budidaya Tanaman Pangan yang Baik sesuai SNI 8969:2021. Di akhir acara, sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung aktif, dipandu oleh penanggung jawab kegiatan, Dian Rahmawati, SP, M.Si.

Para petani berkesempatan berdialog langsung dengan narasumber mengenai tantangan yang mereka hadapi di lapangan dan cara meningkatkan kualitas hasil pertanian mereka.

Dengan kegiatan ini, diharapkan para petani di Bombana dapat semakin memahami pentingnya standar pertanian dan menerapkannya dalam budidaya tanaman pangan, sehingga mampu meningkatkan kualitas hasil pertanian serta kesejahteraan mereka.

**Pompa Air Tingkatkan
Produktivitas Petani Bombana di**

Tengah Ancaman Kemarau

Bombana, sultranet.com - petani di Desa Karya Baru, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, menerima bantuan 25 unit mesin pompa air dari program pompanisasi Kementerian Pertanian. Bantuan ini diharapkan dapat menjaga produktivitas pangan di wilayah yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan di Sulawesi Tenggara. (27/8/2024)

Penyerahan bantuan tersebut disaksikan langsung oleh Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BSIP) Sultra, Dr. Abdul Wahab, SP, MP., bersama tim Liaison Officer (LO) Program Pemantauan dan Advokasi Teknis (PAT) Kabupaten Bombana, serta pejabat dari Dinas Pertanian Bombana, Muhammad Rizal, S.Pt., dan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Poleang Utara, Daud Dalle, SP. Mereka juga memantau distribusi serta pemanfaatan pompa air di Desa Karya Baru.

Desa Karya Baru memiliki areal persawahan seluas 120 hektare dengan sumber pengairan utama dari Sungai Poleang. Kepala BSIP Sultra berharap bantuan ini dapat mendukung stabilitas pengairan, terutama di tengah ancaman kemarau dan perubahan cuaca yang tidak menentu.

“Dengan adanya pompa air ini, kami berharap petani tetap bisa panen secara maksimal meski dihadapkan pada kondisi cuaca yang sulit,” ungkap Abdul Wahab.

Yuliani Zainuddin, SP., selaku LO PAT Kabupaten Bombana, memastikan distribusi pompa air berjalan lancar dengan terus berkoordinasi bersama pihak Dinas Pertanian setempat. Dari 25 unit pompa yang diterima Kabupaten Bombana, 2 unit di antaranya telah beroperasi di Desa Karya Baru.

Bantuan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan di wilayah Bombana, mengingat pentingnya keberlanjutan pengairan bagi sawah-sawah di daerah tersebut. Para petani kini lebih siap menghadapi tantangan cuaca dan tetap menjaga produktivitas pangan daerah.

Inspektorat Bombana lakukan pemeriksaan audit ketaatan OPD Semester I Tahun 2024

Bombana, sultranet.com - Pemeriksaan Audit Ketaatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bombana pada Semester I Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan Juli hingga Agustus 2024.

Pemeriksaan ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana yang melibatkan empat Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV, bersama tim auditor untuk memeriksa 30 OPD yang ada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.

Pemeriksaan ini mencakup beberapa ruang lingkup, di antaranya laporan pertanggungjawaban keuangan, pengadaan barang dan jasa, pengadaan bantuan kepada masyarakat, pengadaan aset, serta pemeriksaan laporan kepegawaian.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan kegiatan yang sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah menjalankan tugasnya dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Daerah dibantu oleh Inspektorat Daerah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan berjalan dengan baik dan transparan.

“Audit Ketaatan Semester I ini merupakan rutinitas tahunan yang dilakukan Inspektorat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,” ungkap Ridwan, S.Sos., M.P.W., Inspektur Daerah Kabupaten Bombana.

Ridwan menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa OPD-OPD di Kabupaten Bombana telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, serta untuk mencegah terjadinya

penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya daerah.

Lebih lanjut, Ridwan menambahkan bahwa agar proses pemeriksaan berjalan lancar, setiap OPD yang diperiksa diharapkan dapat lebih proaktif dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan.

Dokumen-dokumen tersebut mencakup pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, penerimaan bantuan kepada masyarakat, dokumen aset milik OPD, dan laporan kepegawaian.

“Kami berharap agar semua pihak yang terkait dapat bekerja sama dengan baik, dengan menyiapkan dokumen yang diminta, guna memperlancar proses pemeriksaan,” jelas Ridwan, yang juga menekankan pentingnya keterbukaan dan kerjasama antara Inspektorat dan OPD untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.

Proses audit ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana setiap OPD mematuhi peraturan yang berlaku, serta menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah ke depan.

Pemeriksaan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan bebas dari praktik kecurangan.

Dengan adanya pemeriksaan ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan yang ketat terhadap seluruh OPD, sehingga pemerintahan di Kabupaten Bombana dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. (adv)

**KPU Bombana Umumkan
Pendaftaran Pasangan Calon**

Bupati

Bombana - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana secara resmi mengumumkan pembukaan pendaftaran bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Langkah ini menandai dimulainya proses pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Bombana, dengan penekanan pada transparansi dan akuntabilitas di setiap tahapan pemilihan.

Ketua KPU Bombana, Hasdin Nampo, menyatakan bahwa seluruh proses pendaftaran akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. Peraturan tersebut mengatur tata cara pencalonan untuk pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Bombana.

Salah satu aspek krusial dalam pengumuman ini adalah syarat minimal dukungan politik yang harus dipenuhi oleh calon pasangan. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 791 Tahun 2024, setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati wajib didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh setidaknya 10% suara sah dalam Pemilu 2024 untuk DPRD Bombana. Dengan kata lain, pasangan calon harus mendapatkan dukungan minimal sebesar 9.436 suara.

Detail Pendaftaran dan Syarat Administratif

Pendaftaran calon akan berlangsung mulai tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024 di Kantor KPU Kabupaten Bombana. Jam operasional pendaftaran ditetapkan mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WITA pada dua hari pertama, dan akan diperpanjang hingga pukul 23.59 WITA pada hari terakhir untuk mengakomodasi seluruh pendaftar.

Selain dukungan politik, calon Bupati dan Wakil Bupati juga harus memenuhi berbagai persyaratan administratif dan legal. Persyaratan tersebut meliputi integritas ideologi, rekam jejak hukum, kesehatan fisik dan mental, serta komitmen finansial. Untuk memastikan transparansi dan efisiensi proses pendaftaran, calon diwajibkan menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang telah disediakan oleh KPU.

“Kami mengimbau seluruh pasangan calon untuk segera mempersiapkan seluruh

berkas yang dibutuhkan dan memanfaatkan waktu pendaftaran dengan sebaik-baiknya. Proses pendaftaran ini akan diawasi dengan ketat untuk menjamin tidak ada pelanggaran yang terjadi,” ujar Hasdin Nampo.



Upaya KPU dalam Menjamin Proses yang Adil dan Transparan

KPU Bombana juga telah menyediakan layanan helpdesk yang siap memberikan informasi dan bantuan terkait semua tahapan pendaftaran, termasuk penggunaan Silon. Layanan ini diharapkan dapat membantu calon dan partai politik dalam memenuhi semua persyaratan pendaftaran.

“Pilkada Bombana 2024 bukan hanya sekadar memilih pemimpin daerah, tetapi

juga menjadi cerminan dari demokrasi lokal yang sehat, transparan, dan akuntabel. Kami berharap masyarakat Bombana dapat memilih pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi mereka,” tambah Hasdin.

Seluruh informasi terkait pendaftaran dan syarat pencalonan dapat diakses melalui situs resmi KPU atau link berikut:

<https://bit.ly/PengumumanPendaftaranCalonBupatiBombanaTahun2024>

KPU Wakatobi Umumkan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

PENGUMUMAN

NOMOR 19 / PL.02.2-Pu/7407/2024

TENTANG

PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI
TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi mengumumkan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi Nomor 470 Tahun 2024 mengenai Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 menyatakan syarat minimal suara sah **6.028 (enam ribu dua puluh delapan)** suara
2. Waktu dan Tempat Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, sebagai berikut:
 - a. hari/tanggal : Selasa, 27 Agustus 2024 s.d Rabu, 28 Agustus 2024
waktu : Pukul 08.00 s.d Pukul 16.00 WITA
 - b. hari/tanggal : Kamis, 29 Agustus 2024
waktu : Pukul 08.00 s.d Pukul 23.59 WITA
 - c. tempat : Kantor KPU Kabupaten Wakatobi Jl. Pulau Runduma
Manugela Wangi-Wangi.
3. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati merupakan warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia.
4. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
 - o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - p. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, atau Pejabat Walikota;
 - q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan;
 - r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan; dan
 - s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
5. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan:
- a. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
 - b. berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara; dan
 - d. mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.
6. Permohonan Akses Silon untuk Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagai berikut:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Wakatobi mengajukan permohonan pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada KPU Kabupaten Wakatobi;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Wakatobi menunjuk admin Silon dan Petugas Penghubung disertai dengan surat penunjukan;
 - c. Pengajuan permohonan pembukaan akses Silon dapat dilakukan oleh petugas penghubung dengan menyerahkan surat permohonan pembukaan akses Silon menggunakan **formulir MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK** yang dapat ditandatangani oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Wakatobi serta dilampiri dengan surat penunjukan petugas penghubung;
 - d. Pasangan Calon dapat mengunduh format Formulir MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK, melalui https://bit.ly/Akses_SILON
7. KPU Kabupaten Wakatobi membuka layanan *helpdesk* pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, Informasi lebih lanjut terkait tata cara Pembukaan Akses Silon dan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 dapat menghubungi *sdr. Abdul Majid* (081343943537) dan *sdr. Patriot Harsda Toundu* (082261951728) atau dengan datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Wakatobi yang beralamat di Jalan Pulau Runduma No. 9 Manugela Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Kendari
pada tanggal 24 Agustus 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Wakatobi



La Deni

Download Pengumuman

Klik Link dibawah ini

[Pengumuman_Pendaftaran_Pasangan_Calon_KPU Wakatobi](#)

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI**

Rabu
27
November
2024

Pengumuman

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 19/PL.02.2-Pu/7407/2024
TENTANG
PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI
TAHUN 2024**

untuk lebih lengkapnya Scan Barcode



atau kunjungi laman :

https://bit.ly/Pendaftaran_Calon_Pilkada-Wakatobi2024

 Maimo to pili!
Si SUK

 kab-wakatobi.kpu.go.id  [KPU Kabupaten Wakatobi](#)  [kpu_kab_wakatobi](#)  [KpuWakatobi](#)

Pengumuman KPU Wakatobi

Inspektorat Bombana Raih Juara Pertama Lomba Kebersihan Antar OPD

Bombana, sultranet.com - Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar lomba kebersihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Kegiatan tahunan ini menjadi ajang bergengsi bagi setiap OPD untuk berlomba menciptakan lingkungan kerja yang bersih, tertata, dan nyaman. Tahun ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana berhasil meraih juara pertama dalam lomba kebersihan tersebut. (23/8/2024)

Kegiatan lomba ini, yang sudah rutin dilaksanakan menjelang perayaan HUT Kemerdekaan, bertujuan untuk memotivasi seluruh jajaran pemerintahan daerah dalam menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kerja mereka. Selain itu, lomba ini juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa kebanggaan dan kesadaran pentingnya kebersihan di kalangan aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Bombana.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W, mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas prestasi yang diraih oleh Inspektorat. Menurutnya, penghargaan yang diterima sebagai kantor terbersih di lingkungan Pemda Kabupaten Bombana tidak terlepas dari komitmen pimpinan serta kekompakan dan kebersamaan seluruh jajaran Inspektorat dalam menjaga kebersihan kantor.

“Alhamdulillah, kami mendapatkan predikat sebagai kantor terbersih di lingkup Pemda Kabupaten Bombana. Ini berkat kerja keras dan kekompakan seluruh staf Inspektorat yang selalu menjaga kebersihan kantor sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai pelayan masyarakat,” ujar Ridwan dengan penuh rasa syukur.

Penilaian kebersihan kantor dilakukan berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh tim penilai yang dikoordinatori oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana. Kriteria penilaian mencakup berbagai aspek kebersihan dan penataan kantor, seperti kebersihan fasilitas umum seperti toilet, pemanfaatan pekarangan kantor, kebersihan ruang kerja, pemilahan sampah, penataan taman dan halaman, serta ruang laktasi dan jalur evakuasi.

“Kami berterima kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup yang telah menginisiasi lomba kebersihan ini. Penataan dan kebersihan kantor bukan hanya tentang menjaga estetika, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan sehat bagi seluruh pegawai. Kami berharap, prestasi ini dapat memotivasi OPD lainnya untuk selalu menjaga kebersihan dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif,” tambah Ridwan.

Selain Inspektorat Daerah, beberapa OPD lain juga berpartisipasi dalam lomba kebersihan ini. Meskipun Inspektorat berhasil meraih juara pertama, seluruh peserta menunjukkan semangat tinggi dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan tertata. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa upaya menjaga kebersihan dan keteraturan di lingkungan kerja sangat penting untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan publik.

Melalui lomba ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap agar kebiasaan menjaga kebersihan dan kerapian tidak hanya terwujud dalam lomba, tetapi menjadi budaya yang diterapkan setiap hari di seluruh lingkungan kerja pemerintahan. Kegiatan ini juga menjadi salah satu cara untuk memperingati kemerdekaan dengan mengajak seluruh ASN untuk menjaga lingkungan kerja sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara dan masyarakat.

Dengan adanya lomba kebersihan ini, diharapkan seluruh OPD di Kabupaten Bombana akan semakin termotivasi untuk menjaga kebersihan kantor, menciptakan lingkungan yang nyaman, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. (adv)

Pj. Bupati Bombana Luncurkan Program Gemarikan untuk Cegah Stunting

BOMBANA, Sultranet.com - Pemerintah Kabupaten Bombana, melalui Dinas Perikanan, meluncurkan kegiatan Gerakan Gemar Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang diadakan di Desa Lakomea, Kecamatan Rarowatu, pada Kamis (22/8/2024). Acara tersebut dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, bersama dengan Forkopimda Kabupaten Bombana, Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli Bupati, Camat Rarowatu, Kepala Desa se-Kecamatan Rarowatu, serta masyarakat setempat.

Kegiatan Gemarikan bertujuan untuk mengajak masyarakat memerangi stunting dengan meningkatkan konsumsi ikan segar, yang dikenal kaya akan nutrisi penting bagi pertumbuhan anak. Dalam acara tersebut, bantuan ikan segar sebanyak 1.337 kg disalurkan kepada 1.079 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Bombana, terutama untuk desa-desa yang memiliki keluarga berisiko stunting. Pendistribusian ikan putih ini merupakan langkah awal untuk mendorong masyarakat mengonsumsi ikan sebagai bagian dari pola makan sehat.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Edy Suharmanto menekankan bahwa penurunan angka stunting memerlukan strategi dan program yang melibatkan berbagai sektor. "Masalah percepatan penurunan stunting telah menjadi program prioritas pemerintah daerah. Kita tidak bisa bekerja sendiri; diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan ini," ujarnya.



Kedatangan Pj. Bupati Edy Suharmanto disambut tarian penyambutan

Edy Suharmanto juga menjelaskan bahwa konsumsi ikan memiliki peranan penting dalam mendukung kesehatan dan pertumbuhan anak-anak. Ia menggarisbawahi bahwa ikan mengandung asam lemak omega-3, protein, serta vitamin yang esensial bagi perkembangan otak dan fisik anak. “Konsumsi ikan harus dijadikan kebiasaan, terutama bagi anak-anak yang sedang dalam fase tumbuh kembang,” tambahnya.

Pj. Bupati memberikan apresiasi kepada Dinas Perikanan yang telah menginisiasi program Gemarikan ini dan berharap kegiatan serupa dapat dilanjutkan ke desa-desa lain di Bombana. Ia mengajak semua stakeholder, termasuk masyarakat, untuk berperan aktif dalam menyukseskan program ini. “Kita harus bersatu padu dalam upaya menurunkan angka stunting. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” ungkapnya.

Selain penyaluran ikan, program Gemarikan juga mencakup edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dinas Perikanan berencana untuk mengadakan pelatihan dan seminar yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat ikan bagi kesehatan.

Kegiatan ini mendapatkan respon positif dari masyarakat setempat yang menyambut baik inisiatif pemerintah dalam memerangi stunting. Salah seorang warga, Rani (35), menyatakan, “Kami sangat berterima kasih atas bantuan ini. Ikan adalah sumber protein yang baik untuk anak-anak kami. Dengan program ini, semoga kami bisa lebih sadar akan pentingnya konsumsi ikan.”

Edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya konsumsi ikan juga akan dilakukan melalui berbagai platform, termasuk media sosial dan pertemuan komunitas. Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat tidak hanya menerima bantuan ikan, tetapi juga memahami manfaat jangka panjang dari konsumsi ikan yang teratur.

Sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah, Pj. Bupati juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk bersama-sama menanggulangi stunting. Kerjasama ini diharapkan dapat menghadirkan solusi yang komprehensif dan efektif dalam memperbaiki gizi dan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap dapat menurunkan angka stunting secara signifikan, menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas, serta mewujudkan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan. “Mari kita bergandeng tangan untuk memastikan generasi mendatang tumbuh dengan baik, sehat, dan berdaya saing,” tutup Edy Suharmanto.

Bombana Menuju Kabupaten Layak Anak: Pj. Bupati Kukuhkan Forum Anak Daerah

BOMBANA, sultranet.com - Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, menghadiri acara Deklarasi Bombana Menuju Kabupaten Layak Anak dan mengukuhkan Forum Anak Daerah Kabupaten Bombana. Acara

yang berlangsung di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana ini menandai langkah penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak di wilayah Kabupaten Bombana. Selasa (20/8/2024)

Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk perwakilan dari organisasi non-pemerintah, tokoh masyarakat, dan anak-anak, yang menunjukkan dukungan luas terhadap inisiatif ini. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemerintah daerah telah melakukan evaluasi mandiri Kabupaten Layak Anak Tahun 2024. Dengan hasil evaluasi ini, diharapkan dapat mewujudkan 22 kecamatan menjadi kecamatan ramah anak, 144 desa/kelurahan sebagai desa/kelurahan ramah anak, 331 sekolah sebagai sekolah ramah anak, serta 22 puskesmas menjadi puskesmas ramah anak.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Edy Suharmanto menekankan pentingnya koordinasi seluruh stakeholder untuk memenuhi hak-hak anak secara berkesinambungan. "Pemenuhan hak-hak anak adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah daerah berkewajiban untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan anak melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak," ujarnya.

Edy menjelaskan bahwa terdapat lima klaster penting yang harus dipenuhi untuk menciptakan Kabupaten Layak Anak. Klaster tersebut meliputi: klaster identitas anak yang mencakup pemenuhan hak sipil dan kebebasan; klaster lingkungan pengasuhan alternatif; klaster kesehatan dan kesejahteraan dasar; klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta klaster perlindungan khusus. "Dengan adanya klaster ini, kami berharap dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak di Bombana," tambahnya.



Peserta acara Deklarasi Bombana Menuju Kabupaten Layak Anak

Acara ini juga diisi dengan pengukuhan Forum Anak Daerah Kabupaten Bombana. Forum ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi anak-anak untuk menyuarakan hak dan aspirasi mereka, serta berperan aktif dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang ramah anak. “Kami ingin anak-anak di Bombana memiliki suara dan dapat berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada masa depan mereka,” jelas Edy Suharmanto.

Partisipasi aktif berbagai pihak dalam acara ini menunjukkan tekad bersama untuk mewujudkan Bombana sebagai Kabupaten Layak Anak. Dukungan dari orang tua, pendidik, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat upaya ini, sehingga target yang diharapkan dapat terealisasi dengan baik.

Edy Suharmanto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam mewujudkan visi ini. “Sinergitas dan kolaborasi seluruh stakeholder sangat diperlukan agar target yang diharapkan dapat dicapai. Mari kita dukung anak-anak kita untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan aman,” tutupnya.

Dengan adanya langkah-langkah strategis ini, Pemerintah Kabupaten Bombana optimis dapat menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mewujudkan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Harapan besar tertuju pada generasi mendatang untuk menjadi pribadi yang berkualitas, sehat, dan berdaya saing. Dengan dukungan dan kerjasama yang kuat, diharapkan Bombana dapat menjadi teladan bagi daerah lain dalam upaya menciptakan Kabupaten

Inspektorat Bombana Ikuti Harmonisasi Raperbup Bombana Tentang Kebijakan Anti Fraud Terintegrasi

Bombana, sultranet.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana mengikuti rapat harmonisasi mengenai Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Kebijakan Anti-Fraud Terintegrasi yang diadakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara pada Selasa, 20 Agustus 2024.

Dalam kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana diwakili oleh Perwakilan dari Sekretariat Daerah, Staf Ahli, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana.

Rapat harmonisasi ini bertujuan untuk menyelaraskan dan merumuskan kebijakan yang akan diterapkan dalam pengendalian kecurangan atau fraud di Pemerintahan Kabupaten Bombana.

Kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari penyalahgunaan wewenang hingga tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, perancangan kebijakan anti-fraud ini diharapkan dapat mengurangi risiko tersebut, menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bersih.

Kepala Bidang Hukum Kemenkumham Sulawesi Tenggara, Linda Fatmawati Saleh, menjelaskan bahwa rapat harmonisasi ini sangat penting agar Raperbup yang dirancang dapat sesuai dengan regulasi yang ada, serta memenuhi kebutuhan daerah dalam mencegah dan mengendalikan potensi kecurangan.

“Tujuan dari harmonisasi ini adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang

akan diterapkan di Bombana dapat memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan,” jelas Linda.

Linda juga mengungkapkan bahwa pengendalian kecurangan di pemerintahan daerah memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah maupun masyarakat.

“Kami berharap kebijakan anti-fraud ini tidak hanya berbentuk aturan, tetapi juga menjadi budaya di pemerintahan, yang menciptakan kesadaran untuk menghindari penyimpangan dalam setiap kegiatan pemerintah,” tambahnya.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana juga terlibat aktif dalam rapat ini. Perwakilan dari Inspektorat menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan Raperbup tentang kebijakan anti-fraud.

Inspektorat Kabupaten Bombana turut memberikan masukan mengenai teknik pengawasan dan pengendalian yang sesuai dengan kondisi daerah. “Kami siap bekerja sama dengan pihak Kemenkumham dan instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan secara efektif di Kabupaten Bombana,” ungkap Inspektur Inspektorat Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W.

Raperbup yang sedang disusun mencakup beberapa aspek penting, termasuk strategi pengendalian kecurangan, pembentukan lingkungan pengendalian yang kondusif, dan pembinaan terhadap aparatur pemerintahan agar terhindar dari perilaku kecurangan.

Selain itu, Raperbup ini juga akan mengatur pembentukan satuan tugas pengendalian kecurangan yang akan bertugas secara khusus untuk memantau dan memastikan penerapan kebijakan anti-fraud di seluruh jajaran pemerintahan.

Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, Raperbup ini juga akan mengatur tentang pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan celah yang dapat dimanfaatkan untuk penyimpangan.

“Dengan adanya Raperbup ini, kami berharap Kabupaten Bombana dapat menjadi contoh daerah yang berhasil mengendalikan dan mencegah tindak kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan,” kata Ridwan

Selain itu, pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur juga menjadi bagian dari materi muatan Raperbup ini. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

“Kami berkomitmen untuk melibatkan seluruh aparatur dalam implementasi kebijakan ini, agar dapat menciptakan pemerintahan yang tidak hanya efisien, tetapi juga bersih dari penyalahgunaan kekuasaan,” tegasnya

Pentingnya kebijakan anti-fraud yang terintegrasi juga menjadi fokus utama dalam rapat ini. Kebijakan yang disebut ***beleidsregel*** ini dirancang berdasarkan kewenangan administrasi negara yang diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Melalui kebijakan ini, diharapkan terjadi perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan bebas dari praktik-praktik kecurangan.

Secara keseluruhan, rapat harmonisasi ini diharapkan dapat menghasilkan Raperbup yang tidak hanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga dapat diimplementasikan dengan efektif dan memberi dampak positif terhadap tata kelola pemerintahan Kabupaten Bombana.

Pemerintah daerah, bersama dengan Kemenkumham, berkomitmen untuk terus berkolaborasi dalam menciptakan sistem pengendalian kecurangan yang lebih baik, agar pelayanan publik di Kabupaten Bombana semakin terpercaya dan berkualitas. (Adv)